STRATEGI KPU KABUPATEN SOLOK SELATAN DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI RUMAH PINTAR PEMILU SEBAGAI PUSAT SUMBER BELAJAR KEPEMILUAN

Dedeka Putri[1], Al Rafni[2], Suryanef[3], Cici Nur Azizah[4]

[1,2,3,4]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : dedekaputri131@gmail.com[1], alrafni@fis.unp.ac.id[2]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan dalam mempertahankan eksistensi Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai pusat sumber belajar kepemiluan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam menjaga keberlanjutan RPP didukung oleh enam strategi utama, yaitu: (1) perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam RKA tahunan; (2) penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana; (3) penguatan kapasitas sumber daya manusia; (4) pelaksanaan program edukasi kepemiluan secara rutin; (5) kolaborasi dengan lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat; serta (6) monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Penerapan strategi tersebut membuktikan bahwa eksistensi RPP tidak hanya ditentukan oleh faktor anggaran, tetapi juga oleh komitmen, kreativitas, dan profesionalitas pengelola dalam menjaga fungsi RPP sebagai sarana pendidikan politik yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Strategi kelembagaan, KPU, Rumah Pintar Pemilu, Kepemiluan, Pendidikan Politik*

ABSTRACK

This study aims to analyze the strategies implemented by the General Elections Commission (KPU) of Solok Selatan Regency in maintaining the existence of the Election Smart House (Rumah Pintar Pemilu/RPP) as a center for electoral learning. This research employed a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the success of KPU Solok Selatan in sustaining the RPP is supported by six key strategies: (1) integrated planning and budgeting within the annual work plan (RKA); (2) provision and maintenance of facilities and infrastructure; (3) strengthening of human resource capacity; (4) regular implementation of electoral education programs; (5) collaboration with educational institutions, local government, and community organizations; and (6) continuous monitoring and evaluation. These strategies demonstrate that the sustainability of RPP is not solely dependent on financial resources but also on the commitment, creativity, and professionalism of its managers in maintaining RPP's role as an inclusive, adaptive, and sustainable political education center.

Keywords : *Institutional Strategy, KPU, Election Smart House, Electoral Literacy, Political Education*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai wujud nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang transparan, independen, dan berintegritas, dibutuhkan lembaga penyelenggara yang profesional, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Pamungkas, 2009). Salah satu inovasi strategis KPU dalam meningkatkan literasi kepemiluan masyarakat adalah melalui pendirian *Rumah Pintar Pemilu* (RPP), yang berfungsi sebagai pusat edukasi publik tentang demokrasi dan proses pemilu (Ninla Elmawati Falabiba, 2019). Sejak diluncurkan pada tahun 2015, RPP telah berkembang hingga mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2020 (Telaumbanua et al., 2021). Namun, beberapa daerah mengalami penurunan aktivitas RPP, bahkan beralih menjadi layanan informasi digital yang bersifat statis. Di tengah kondisi tersebut, RPP Kabupaten Solok Selatan justru mampu mempertahankan keberadaannya dan terus menjalankan fungsi edukatif melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan kegiatan sosialisasi bagi pemilih pemula.

Berbagai penelitian terdahulu menyoroti peran RPP sebagai sarana pendidikan politik, tetapi sebagian besar berfokus pada efektivitas dan metode pelaksanaan program (Fitriani & Sari, 2018; Masputri et al., 2019; Aryani & Pitono, 2024; Haq et al., 2024). Masih terbatas kajian yang secara khusus mengkaji strategi kelembagaan yang dilakukan oleh KPU untuk menjaga keberlanjutan fungsi RPP. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Solok Selatan dalam mempertahankan eksistensi RPP sebagai pusat sumber belajar kepemiluan. Kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi praktik-praktik strategis yang dapat dijadikan model bagi KPU daerah lain dalam memperkuat pendidikan pemilih dan literasi demokrasi secara berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan dalam mendukung fungsi edukasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai pusat sumber belajar kepemiluan. Metode kualitatif dipilih untuk memungkinkan eksplorasi mendalam tentang makna, pengalaman, dan perspektif individu yang terlibat langsung dalam mengelola dan memanfaatkan RPP (Asep dkk., 2014; Sugiyono, sebagaimana dikutip dalam Pratama, 2018). Penelitian dilakukan di KPU Solok Selatan, yang dipilih karena RPP-nya aktif dan terus berfungsi meskipun sumber daya terbatas. Populasi penelitian ini terdiri dari pejabat dan staf KPU yang terlibat dalam program pendidikan pemilih dan partisipasi publik. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling, berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung mereka dalam manajemen RPP (Sugiyono, sebagaimana dikutip dalam Suriani dkk., 2023). Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi non-partisipan, sementara data sekunder meliputi dokumen-dokumen kelembagaan seperti rencana strategis, laporan pendidikan, manual RPP, dan publikasi resmi.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2013). Observasi dilakukan untuk memahami latar fisik dan kegiatan pendidikan dalam RPP, sementara wawancara digunakan untuk memperoleh wawasan detail dari informan, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam menggali tema-tema yang relevan (Salim & Syahrum, 2012; Rokhmah dkk., 2024). Dokumentasi melengkapi metode-metode ini dengan

menyediakan informasi kontekstual tambahan. Untuk memastikan kredibilitas data, triangulasi sumber dan metode diterapkan, dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan teknik (Sugiyono, 2013). Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan yang dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan selama penelitian. Proses sistematis ini memungkinkan identifikasi pola dan makna kunci yang mencerminkan strategi dan praktik terbaik yang diterapkan KPU Solok Selatan dalam menjaga keberlanjutan peran pendidikan RPP.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan berhasil mempertahankan eksistensi Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai pusat sumber belajar kepemiluan melalui enam strategi utama, yaitu perencanaan dan penganggaran, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan sumber daya manusia (SDM), pelaksanaan program edukasi, kolaborasi dan kemitraan, serta monitoring dan evaluasi. Keenam strategi ini saling terhubung dan membentuk sistem pengelolaan yang adaptif serta berkelanjutan.

Strategi perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan mengintegrasikan program RPP ke dalam Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) tahunan berdasarkan Renstra KPU. Langkah ini memastikan kegiatan RPP berjalan setiap tahun melalui perencanaan yang efisien dan berorientasi pada kebutuhan edukasi pemilih (Miles & Huberman, 1994). Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, KPU melakukan perawatan dan pembaruan fasilitas serta memanfaatkan media digital dan infografis untuk menciptakan suasana belajar yang menarik. Inovasi sederhana ini membuktikan bahwa kualitas edukasi tidak selalu bergantung pada besar kecilnya fasilitas (Lestari & Nugroho, 2020).

Selanjutnya, penguatan SDM menjadi kunci dalam menjaga kualitas layanan edukatif RPP. KPU secara rutin melaksanakan pembinaan, pelatihan internal, dan koordinasi lintas divisi agar setiap pengelola memahami perannya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Strategi ini menunjukkan penerapan capacity building yang mendorong kemandirian dan profesionalitas tim pengelola (Grindle, 1997). Pada tahap pelaksanaan program edukasi, RPP aktif menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi pelajar serta masyarakat umum, yang berorientasi pada peningkatan literasi politik partisipatif (Suryanef, 2015).

Dalam hal kolaborasi dan kemitraan, KPU menjalin kerja sama dengan sekolah, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat guna memperluas jangkauan edukasi politik. Pendekatan ini memperkuat partisipasi masyarakat dan membangun sinergi antaraktor sosial (Huntington & Nelson, 1994). Sementara itu, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui rapat internal dan laporan kegiatan untuk menilai efektivitas program serta memperbaiki pelaksanaan di masa mendatang (Moleong, 2019).

Secara keseluruhan, strategi KPU Kabupaten Solok Selatan menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan eksistensi RPP tidak hanya bergantung pada sumber daya finansial, tetapi juga pada kreativitas, kolaborasi, dan komitmen pengelolanya dalam menjaga fungsi RPP sebagai ruang pembelajaran politik yang edukatif, adaptif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam mempertahankan eksistensi Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai pusat sumber belajar kepemiluan diwujudkan melalui enam strategi yang saling berkaitan, yaitu perencanaan dan penganggaran, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan sumber daya manusia, pelaksanaan program edukasi, kolaborasi dan kemitraan, serta monitoring dan evaluasi. Penerapan strategi tersebut menunjukkan bahwa KPU mampu mengelola RPP secara adaptif, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan dengan menekankan aspek perencanaan yang sistematis, inovasi dalam penyediaan fasilitas, peningkatan kapasitas SDM, serta perluasan jejaring kerja sama. Upaya ini menegaskan bahwa eksistensi RPP tidak semata ditentukan oleh dukungan anggaran, melainkan oleh komitmen, profesionalitas, dan kreativitas pengelola dalam menjaga fungsi RPP sebagai sarana pendidikan politik yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Grindle, M. S. (1997). Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries. Harvard University Press.

Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1994). Partisipasi politik di negara berkembang. Jakarta: Rajawali Pers.

Lestari, D., & Nugroho, A. (2020). Inovasi media pembelajaran politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi lokal. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 10(2), 134–142.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Suryanef. (2015). Pendidikan politik dalam masyarakat demokratis. Padang: UNP Press.